PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
7. Pengeluaran Daerah uang yang keluar dari kas Daerah
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun naggaran berkenaan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 824.715.315.691 (delapan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer ; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.128.500.000,00 (Tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah ;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.569.500.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.509.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
   a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
   b. Pajak Restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
   c. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videtron/Megatron direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
   d. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah).
   e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
   f. PBBP2 direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
   g. BPHTB-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.569.500.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 1.239.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
      1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp 0,00.
      2. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
      3. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp 461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
      4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
      5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
   b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
      1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
      2. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
      3. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
      4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yaitu Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(4) Pendapatan Lain – Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.509.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
c. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
e. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 43.234.000.000,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 739.711.665.691 (tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 688.643.931.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri atas :
   1. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 647.996.103.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah).
   2. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp 0,00.
   3. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
   4. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 40.647.828.000,00 (empat puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
b. Pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
   1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
   2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar

delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. pendapatan Hibah;
b. dana Darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00,

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 899.949.091.788,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1). Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 662.352.801.152,00 (enam ratus enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 396.816.175.539,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 254.890.223.369,00 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

(4). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.646.402.244,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(7). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 158.003.459.982,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.371.017.230,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.765.230.008,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu delapan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 39.040.605.613,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 76.579.302.631,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.709.904.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 78.592.830.654,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.580.709.754,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.012.120.900,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua belas juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.
(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00, yang terdiri atas :
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah;
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
   b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I — ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial beripa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6. Lampiran VI — daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
7. Lampiran VII — rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

		kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Desember 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 87

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**75.128.500.000**
4.1.01	Pajak Daerah	13.050.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	150.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.200.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.200.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.200.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.569.500.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.239.500.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	228.500.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	128.500.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	461.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	91.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	370.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.030.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	390.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	65.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	125.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	240.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	240.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.509.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	500.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.500.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.500.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.500.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	275.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	275.000.000
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	275.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	43.234.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	43.234.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	43.234.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**739.711.665.691**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.643.931.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	647.996.103.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	40.706.485.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.969.402.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.780.375.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.387.320.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.030.474.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	225.358.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	452.753.785.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	452.753.785.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.582.272.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.451.519.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.795.139.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.472.309.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.236.312.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.001.262.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	365.734.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	259.997.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	109.953.561.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.808.160.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.950.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.875.941.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.065.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.873.851.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.230.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.020.400.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.313.393.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.070.937.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.603.834.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.075.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	40.647.828.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	40.647.828.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	40.647.828.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.067.734.691
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.067.734.691
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.067.734.691
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.894.170.324
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.273.152.640
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.379.290.239
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.165.275
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.176.956.213
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**9.875.150.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.875.150.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.875.150.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.875.150.000
	Jumlah Pendapatan	**824.715.315.691**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**662.352.801.152**
5.1.01	Belanja Pegawai	396.816.175.539
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.797.873.230
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	174.710.481.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	169.515.114.591
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.195.366.409
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.917.729.207
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.299.747.927
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	617.981.280
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.814.806.309
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.814.806.309
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.350.941.450
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.350.941.450
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.543.366.675
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.992.806.675
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	550.560.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.709.827.196
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.278.783.356
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	431.043.840
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	249.481.524
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	130.998.971
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	118.482.553
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.480.269
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.420.269

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	60.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.188.759.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.888.759.600
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	300.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	650.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	500.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	650.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	500.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	150.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.630.406.136
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.016.662.229
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.016.662.229
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	363.743.907
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	363.743.907
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	250.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	250.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.632.289.648
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	528.610.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.050.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.510.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	250.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	82.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	112.750.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.300.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.815.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.815.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.875.941.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	53.875.941.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.873.851.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.873.851.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.065.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.065.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.284.062.648
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.284.062.648
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.657.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.731.110.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	692.170.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	234.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	338.730.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	338.730.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.843.942.490
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.027.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.027.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.045.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.045.900
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.626.500
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.626.500
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	61.730.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	61.730.200
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.020.999.290
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.799.290
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.800.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.961.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.720.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.720.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246.504.035
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	469.056
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	469.056
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	15.664
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	15.664
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	72.549.035
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	450.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	13.581.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	990.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	24.466.975
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.361.060

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.700.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	2.000.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	154.280.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	154.280.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	154.280.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.000.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.000.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.890.223.369
5.1.02.01	Belanja Barang	85.612.780.502
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.607.922.302
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	557.956.481
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	357.750.590
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.882.684.517
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	179.564.050
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80.398.500
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	250.250.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.348.991.703
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.717.675.688
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	49.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	30.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.502.158.842
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.437.757.074
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.965.173.037
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	228.260.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	629.368.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	602.980.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	585.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.955.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.777.210.091
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.825.754.983
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.224.834.531
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	644.367.096
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	942.200.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	267.445.000
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	13.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.536.740.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.074.061.600
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	330.563.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.804.314.800
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	332.500.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	349.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.168.747.319
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	24.100.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	18.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	23.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	395.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	405.810.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	142.450.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	692.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.858.200
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.858.200
5.1.02.02	Belanja Jasa	70.754.524.876
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.161.520.676
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.760.112.499
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.960.080.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	32.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	464.352.100
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	861.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	502.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	854.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	176.400.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.572.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	810.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	540.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	36.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	766.550.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.854.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.099.050.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.844.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.351.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.604.800.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.656.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.064.900.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	89.550.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.219.150.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.128.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	10.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	251.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	560.355.050
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	32.900.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	414.300.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	260.375.350
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	359.350.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.371.577.055
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	240.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.827.362.026
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	59.424.196
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	2.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	451.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	967.004.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	146.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.246.288.700
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	329.288.700
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.572.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	165.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	180.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.681.398.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	50.250.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	16.000.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	52.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	278.748.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	157.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.470.450.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	401.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	162.950.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.596.905.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	143.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	643.900.000
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	360.868.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	449.137.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	40.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.931.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.475.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.406.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.350.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.350.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	46.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	757.062.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	294.250.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	407.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	55.312.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.124.093.910
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.124.093.910
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	250.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	12.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	179.990.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	611.103.910
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	21.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.066.679.081
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.666.679.081
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.527.997.380
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	217.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.920.831.701
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	400.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri	400.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.157.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.157.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.440.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	712.500.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	4.500.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.175.145.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.175.145.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.175.145.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	10.646.402.244
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.540.600.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.440.600.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.190.000.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.250.600.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.275.553.300
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.728.033.300
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.728.033.300
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	547.520.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	547.520.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.248.944
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.248.944
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	830.248.944
5.2	**BELANJA MODAL**	**158.003.459.982**

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.371.017.230
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.371.017.230
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	10.371.017.230
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	10.371.017.230
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.765.230.008
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.369.782.360
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.341.303.500
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	1.800.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.518.050.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.023.253.500
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.028.478.860
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	850.000.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	40.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	138.478.860
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.409.479.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.284.479.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	479.479.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.960.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	125.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	125.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3.000.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	3.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	67.762.800
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	67.762.800
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	2.762.800
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	65.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.541.923.324
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	962.702.883
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	962.702.883
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.369.878.721
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.326.146.274
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	98.200.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	61.667.840
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	883.864.607
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	209.341.720
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	41.721.720
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	20.520.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.100.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	130.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.759.457.650
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.726.897.650
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	216.755.930
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.383.700.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	126.441.720
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	32.560.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	4.560.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.860.513.308
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.860.513.308
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.860.513.308
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.210.778.160
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.130.978.160
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.978.160
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.125.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	79.800.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	79.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	847.239.550
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	619.769.550
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	619.769.550
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	227.470.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	179.770.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.700.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	27.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	86.106.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	77.976.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	77.976.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	8.130.000
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	8.130.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	334.560.656
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	334.560.656
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	334.560.656
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31.350.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31.350.000
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	31.350.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.643.277.200
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.643.277.200
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.643.277.200
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	600.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	600.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	600.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.040.605.613
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.181.210.071
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.181.210.071
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.297.914.774
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	193.530.288
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.909.467.841
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.360.685.652
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	332.570.969
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	396.689.467
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	5.690.351.080
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.359.395.542
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.359.395.542
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.359.395.542
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.579.302.631
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.506.286.299
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.307.642.799
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	63.307.642.799
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.198.643.500
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.198.643.500
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.065.140.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.065.140.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.065.140.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	51.796.332
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	51.796.332
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	51.796.332
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	706.080.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	706.080.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	400.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	306.080.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.709.904.500
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.509.904.500
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.509.904.500
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.509.904.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	537.400.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.400.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.400.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	537.400.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**78.592.830.654**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.306.754.754
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.306.754.754
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.306.754.754
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	273.955.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	273.955.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	273.955.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	77.012.120.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	77.012.120.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.364.292.900
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.364.292.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	40.647.828.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 07 Desember 2022

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	40.647.828.000
	Jumlah Belanja	**899.949.091.788**
	Total Surplus/(Defisit)	**(75.233.776.097)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**75.233.776.097**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.233.776.097
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	75.233.776.097
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.233.776.097
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.233.776.097
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**75.233.776.097**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**75.233.776.097**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Bupati Solok Selatan

KHAIRUNAS